

Judul : DPR Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional
Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

DPR Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

JAKARTA-Pemerintah didesak segera mengumumkan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional. Naiknya status musibah yang banyak menelan korban jiwa ini memungkinkan agar penanganan dapat berjalan secara maksimal.

"Bukan saja karena skala dari bencana itu, tetapi ini satu pulau yang terguncang dan di sana itu (sebenarnya) wilayah baru yang sedang kita perkenalkan ke dunia internasional sebagai daerah tujuan wisata, Red). Dan Lombok ini sedang mendapat perhatian yang menggairahkan, karena sebut sebagai tujuan destinasi wisata halal terbaik di dunia," ungkap Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/8).

Lombok, lanjut politisi PKS yang juga berasal dari NTB itu, merupakan salah

satu pulau yang menjadi radar dunia internasional untuk dikunjungi. Sedang dalam perhatian dunia itu, tiba-tiba terjadi gempa maka pemerintah harus melakukan reaksi cepat terhadap penanganannya. "Nggak semasih yang terjadi Aceh. Tetapi, karena efeknya itu meluas hampir di seluruh pulau, dan bahkan di kota Mataram saja, dan Lombok Barat. Artinya kalau yang jauh saja ada korban yang meninggal, apalagi yang terdekat yang sekarang ini sedang tahapan evakuasi," paparnya. Karena itu, menurut Fahri, penanganan korban bencana gempa di Lombok, memerlukan dukungan pemerintah pusat dan juga dukungan sumber daya dari masyarakat secara umum. Sebab, saat ini pemerintahan di NTB sudah memasuki pemerintahan transisi, di mana pemerintahannya sulit belanja karena uangnya itu sudah teralokasikan.

"Mudah-mudahan masyarakat lebih keras tergerak untuk ke Lombok. Nah itu, sumber dayanya saja, khususnya dana dari apa yang akan dibeli oleh masyarakat (korban gempa, Red) setempat. Baik keperluan medis untuk jangka pendek, maupun untuk keperluan selanjutnya, dalam tahapan recovery," ucapnya.

Sedang secara politik, Fahri mengharapkan, kepada Presiden Jokowi agar segera merancang pembentukan daerah otonomi baru di NTB, khususnya Lombok Selatan, karena terlalu jauh dari jangkauan instalasi pembantuan. "Dari titik gempa ke Selong sana, tempat rumah sakit umum itu ada, itu bisa tiga sampai empat jam jarak tempuhnya. Saking jauhnya rumah sakit itu. Apalagi, dalam keadaan gempa sekarang ini, banyak sekali halangan," ucapnya. Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) setuju atas usulan DPR. Oleh sebab itu,

pemerintah menetapkan status tanggap darurat atas bencana gempa yang menimpa Lombok, NTB dan Bali selama dua hingga tiga minggu. "Yang paling penting tanggap darurat, setelah itu rehabilitasi dan rekonstruksi," ujarnya kepada wartawan usai rapat pleno dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor Pusat MUI, Senin (6/8).

JK juga menyampaikan ungkapan bela sungkawa dan simpati terhadap masyarakat yang menjadi korban. Dia juga telah bertemu dengan Gubernur NTB untuk mendapatkan informasi terkini di Lombok. "Menurut Gubernur, Lombok Utara 70 persen banguannya rusak," tuturnya.

Saat ini, kata JK, pemerintah telah mengerahkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Lombok. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan personil TNI telah ter-



NANA WARDANA/INTELL/LOMBOK POST

PERUNTUNGAN-Warga Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat, menyelamatkan barang-barang dari reruntuhan rumahnya, Senin (6/8).

jun langsung untuk menanggulangi bencana gempa di Lombok. Selain itu, Palang Merah Indonesia (PMI) juga ikut aktif memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban gempa di Lombok. Mulai dari

membantu evaluasi, dan mendirikan pos-pos kesehatan. Jusuf Kalla selaku ketua umum PMI, mengatakan, PMI telah mengirim tangki air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena gempa. (aen)